

Kecurangan Keuangan pada Instansi Pemerintah: Refleksi Pengelola Keuangan

Financial Fraud in Government Agencies: Reflections of Financial Managers

Abstrak

Moh. Riskiyadi

Departemen
Akuntansi,
Fakultas Ekonomi
dan Bisnis,
Universitas
Bahaudin
Mudhary Madura,
Indonesia

Surel

Korespondensi:
[mohriskiyadi@uni-
bamadura.ac.id](mailto:mohriskiyadi@uni-
bamadura.ac.id)

Kecurangan keuangan merupakan musuh bersama yang menghambat pembangunan. Fenomena gaya hidup mewah para pejabat pengelola keuangan merupakan signal negatif yang menarik untuk didiskusikan. Tujuan penelitian ini mengungkap esensi faktor penyebab dan modus operandi kecurangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada suatu instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi transendental dengan objek penelitian suatu instansi pemerintah di Pulau Jawa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi pengelola keuangan, supplier dan auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah disebabkan oleh tekanan bergaya hidup mewah, kesempatan yang terbuka lebar karena kewenangan mutlak dalam mengelola keuangan, dan pembenaran memperoleh penghasilan lebih karena tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan instansi pemerintah. Guna menyembunyikan kecurangan tersebut dilakukan manipulasi bukti pengeluaran. Pendapatan yang diperoleh dari kecurangan tersebut dinikmati bersama sebagai kompensasi dari tugas dan tanggung jawabnya yang besar. Dengan penelitian ini diharapkan para pemangku kepentingan, pimpinan tinggi kementerian lembaga, dan auditor pemerintah lebih fokus dalam memitigasi kecurangan keuangan pada instansi pemerintah.

Kata kunci: Kewenangan Mutlak, Kecurangan Keuangan, Instansi Pemerintah, Tanggung Jawab Besar, Gaya Hidup Mewah.

Abstract

Financial fraud is a common enemy that hinders development. The phenomenon of lavish lifestyles among financial management officials is an interesting negative signal. The purpose of this study is to uncover the essence of the causal factors and modus operandi of financial management fraud that occurs in a government agency. This study employs a qualitative, transcendental-phenomenological approach, focusing on a government agency in Java as the research object. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The informants of this study included financial managers, suppliers, and auditors. The results show

that the essence of financial management fraud in government agencies is driven by pressure to maintain a lavish lifestyle, wide-open opportunities enabled by absolute authority over finances, and the justification of obtaining higher income given the significant responsibility for managing government agency finances. To conceal this fraud, the evidence of expenditure is manipulated. The income received from this fraud is shared as compensation for their significant duties and responsibilities. With this research, it is hoped that stakeholders, high-ranking leaders of ministries and institutions, and government auditors will be more focused on mitigating financial fraud in government agencies.

Keywords: Absolute Authority, Financial fraud, Government Agencies, Great Responsibility, Luxurious Lifestyle.

PENDAHULUAN

Kecurangan keuangan menjadi masalah serius bagi pengeluaran keuangan negara. Negara harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat tindakan tersebut (ACFE, 2024). Pengeluaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal akibat praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah (Alfada, 2019; Gründler & Potrafke, 2019). Kecurangan keuangan pada sektor publik berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, sehingga pembiaran permasalahan tersebut berdampak pada masalah yang lebih serius. Akibatnya kecurangan keuangan menjadi semakin sulit untuk diberantas (Prabowo et al., 2018).

Kecurangan keuangan merupakan keniscayaan yang tidak akan pernah punah dari muka bumi. Kecurangan hanya dapat diminimalisir, namun dibabat habis hingga ke akar-akarnya tidak akan pernah terwujud (Rohim et al., 2022). Kecurangan keuangan jarang terlihat dan sulit diungkap, ibarat fenomena gunung es yang tampak bagian kecilnya saja, namun tersembunyi kecurangan yang sangat besar di dalamnya (ACFE, 2024). Dibutuhkan kerjasama setiap individu untuk bersama-sama menekan kecurangan keuangan di sektor pemerintahan. Sebab secara psikologis pencegahan kecurangan keuangan harus dimulai dari setiap individu dengan mengontrol sifat keserakahannya, menjadikan kebiasaan dan membudayakannya di sektor pemerintahan (Lambie & Haugen, 2019).

Menurut Cressey (1953), kecurangan keuangan disebabkan tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Kesempatan yang luas dan tekanan yang tinggi merasionalisasikan perbuatan yang tercela menjadi benar (Rustiarini et al., 2019). Tekanan yang dialami oleh aktor pelaku kecurangan keuangan berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sebesar apapun tekanan yang dihadapi, namun kesempatan tidak pernah ada maka tindakan kecurangan tidak akan terjadi. Sehingga tindakan tercela tersebut lambat laun dirasionalisasi menjadi perbuatan yang biasa saja, sebab telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari (Maulidi, 2020).

Berdasarkan laporan ICW (2025), kecurangan keuangan dalam menyalahgunakan anggaran paling banyak terjadi pada instansi pemerintah, disusul dengan kegiatan fiktif dan markup bukti pengeluaran. Dalam lima tahun terakhir tren peningkatan kerugian keuangan negara terus meningkat akibat kecurangan keuangan pada instansi pemerintah. Kecurangan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah dominan dilakukan oleh aktor penting yang

berkecimpung dalam pengelolaan keuangan (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Kesempatan yang terbuka lebar menjadi faktor yang paling menonjol dibandingkan faktor lainnya. Berbagai fenomena berbeda dialami instansi pemerintah sehingga faktor penyebab kecurangan keuangan juga berbeda. Akibatnya modus yang dilakukan pelaku juga bermacam-macam dalam melakukan perbuatan tercela tersebut (Kohar et al., 2024). Faktor pemicu kecurangan keuangan diantaranya keinginan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan kebutuhan instansi (Riskiyadi et al., 2020), dan kebutuhan dana taktis untuk membiayai kebutuhan yang tidak dianggarkan (Setiawan, 2019). Serta untuk membiayai setoran pajak agar tidak melanggar regulasi perpajakan (Tarjo et al., 2021).

Modus kecurangan keuangan yang dilakukan pengelola keuangan dengan membuat bukti pengeluaran fiktif dan melakukan kegiatan yang tidak penting hanya untuk kepentingan menyerap anggaran yang tersedia (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Modus lainnya dengan melakukan markup pengajuan anggaran dan memanipulasi dokumen pertanggungjawaban (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Beragamnya modus kecurangan yang dilakukan pengelola keuangan menjadi celah untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi kecurangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah berdasarkan pengalaman hidup para pengelola keuangannya. Nantinya juga mengungkap esensi penyebab terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan pada suatu instansi pemerintah.

Fenomena yang terjadi kecurangan keuangan dapat dilakukan sendiri atau berjamaah serta pelaku dapat melakukan berbagai jenis kecurangan sekaligus (Riskiyadi, 2025). Kecurangan keuangan tersebut meliputi manipulasi harga untuk kebutuhan pribadi atau kelompoknya, yaitu sumbangan anggaran untuk organisasinya (Riskiyadi, 2025). Dalam berbagai kasus, kecurangan pengelolaan keuangan terjadi karena norma timbal balik untuk berkompromi melanggar peraturan perundangan (Maulidi, 2020; Riskiyadi, 2021). Perubahan karakter pelaku kecurangan keuangan dapat terlihat dari perubahan hidupnya. Sikap narsisme berupa bergaya hidup mewah dapat menjadi signal peringatan terjadinya kecurangan keuangan. Sebab karakter tersebut yang menjadi faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang menyebabkan kecurangan pengelolaan keuangan (Waromi et al., 2025).

Kecurangan keuangan pada instansi pemerintah dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, kemampuan pelaku memanfaatkan celah regulasi (Indriani et al., 2019) dan pemberian sanksi yang tidak tegas kepada para pelaku. Disamping itu, pencapaian terget kinerja pelaksanaan anggaran (Tarjo & Riskiyadi, 2022), kepatuhan regulasi perpajakan (Riskiyadi et al., 2020) juga menjadi penyebab kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Faktor lain yang memotivasi terjadinya kecurangan keuangan adalah kebiasaan budaya untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan serupa meskipun melanggar ketentuan regulasi (Riskiyadi et al., 2021; Tarjo et al., 2021).

Dalam berbagai studi, pencegahan kecurangan keuangan dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik (Aulia et al., 2024; Sitorus et al., 2025). Membentuk budaya organisasi dan kepemimpinan yang baik sehingga tidak ada ruang kesempatan terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan (Sembiring et al., 2023). Mengungkap kecurangan keuangan lebih efektif menggunakan pendekatan yang lebih halus dibandingkan dengan pendekatan yang arogan. Terbukti penelitian lebih optimal mengungkap kecurangan pengelolaan keuangan dibandingkan dengan investigasi kecurangan oleh lembaga penegak hukum (Suka, 2025). Sebab penelitian menggunakan pendekatan yang halus, sedangkan

investigasi oleh penegak hukum menggunakan pendekatan yang arogan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini hadir untuk mengungkap esensi kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya tentang kecurangan keuangan pada instansi pemerintah umumnya membahas pengujian pengendalian internal, sistem akuntansi, dan mekanisme pengawasan terhadap kecurangan keuangan dari perspektif organisasi dan kebijakan (Haurissa & Dewi, 2021; Wana et al., 2025). Sedangkan dari perspektif pengalaman pengelola keuangan masih jarang dilakukan eksplorasi lebih dalam. Umumnya, penelitian terdahulu juga terfokus pada pendekatan kuantitatif, namun pengungkapan esensi dari kecurangan keuangan dari sudut pandang psikologis dan sosial masih jarang dilakukan (Awaliah, 2023; Waromi et al., 2025). Perspektif faktor yang memotivasi terjadinya kecurangan keuangan menggunakan fraud triangle berdasarkan psikologis dan sosial pengelola keuangan menjadi kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap esensi kecurangan keuangan yang dialami oleh pengelola keuangan suatu instansi pemerintah. Mendeskripsikan pengalaman masing-masing individu dalam mengelola keuangan negara untuk menyimpulkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan. Manfaat penelitian ini agar para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi kecurangan keuangan pada instansi pemerintah. Melakukan mitigasi yang tepat sebelum permasalahan kecurangan pengelolaan keuangan tersebut terjadi. Setidaknya mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pengayaan referensi bagi para auditor untuk lebih fokus pada faktor penyebab dan modus operandi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecurangan Keuangan

Kecurangan (*fraud*) keuangan merupakan perbuatan disengaja yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan orang lain atau organisasi (ACFE, 2024; Riskiyadi, 2025; Roffia & Poffo, 2025). Kecurangan keuangan pada lingkungan pemerintahan berdampak pada kepercayaan publik, efektivitas lembaga, dan menyebabkan kerugian keuangan negara (Wana et al., 2025). Kecurangan keuangan instansi pemerintah umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, tekanan kebutuhan, dan budaya organisasi yang menyebabkan kecurangan terus berkembang (Tarjo & Riskiyadi, 2022). Dengan demikian, faktor penyebab kecurangan keuangan pada instansi pemerintah dipengaruhi oleh faktor individual pelaku dan faktor eksternal, yaitu lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelaku kecurangan (Kohar et al., 2024; Suasri et al., 2025).

Teori Fraud Triangle

Fraud triangle menyatakan bahwa tindakan kecurangan disebabkan karena tiga elemen yang terjadi bersamaan yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran (Cressey, 1953; Siregar et al., 2026). Tekanan merupakan sesuatu yang memotivasi pelaku melakukan kecurangan. Kesempatan merupakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kecurangan. Pembenaran merupakan perasaan pelaku yang membenarkan tindakan kecurangan yang

dilakukannya dengan menganggap kecurangan merupakan perbuatan yang wajar (Kohar et al., 2024; Riskiyadi et al., 2020; Wicaksono et al., 2023).

Tekanan merupakan faktor pendorong terjadinya kecurangan keuangan ketika pelaku membutuhkan karena tuntutan hidup. Kesempatan muncul ketika pengawasan internal lemah sehingga memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Lemahnya pengawasan internal karena lemahnya prosedur, pengawasan yang tidak berkesinambungan sehingga memberikan celah terjadinya kecurangan keuangan. Pembenaan melakukan kecurangan keuangan merupakan pembenaan bahwa yang dilakukan sesuatu yang wajar dan dapat diterima karena suatu situasi dan kondisi tertentu (Awaliah, 2023; Siregar et al., 2026; Tarjo & Riskiyadi, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi digunakan untuk mengungkap esensi dari jalan gelap pengelola keuangan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Makna pengalaman hidup setiap individu pengelola keuangan merepresentasikan suatu fenomena yang diteliti. Peneliti harus mampu mengungkapkan kesamaan pengalaman hidup yang mereka alami dalam suatu fenomena tersebut. Pengalaman masing-masing individu digabungkan untuk mendeskripsikan esensi fenomena secara universal (J. Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini fokus pada pengalaman pribadi individu dalam suatu kelompok untuk merepresentasikan fenomena yang terjadi. Pengalaman masing-masing individu mungkin akan berbeda-beda, namun dalam satu titik tertentu, masing-masing individu mengalami pengalaman yang sama. Persamaan inilah yang diungkapkan untuk menjelaskan esensi fenomena yang terjadi (J. W. Creswell & Creswell, 2022).

Jalan gelap dalam penelitian ini adalah tindakan menyimpang yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan fraud yang dilakukan oleh individu-individu pengelola keuangan suatu instansi pemerintah daerah. Mengungkap esensi fenomena yang diteliti dapat diperoleh dari karakter individu pengelola keuangan. Pendekatan fenomenologi berdasarkan psikologis informan juga digunakan dalam penelitian ini (Englander & Morley, 2023). Pendekatan fenomenologi transendental tepat digunakan untuk mengungkap pengalaman yang dialami oleh masing-masing individu pengelola keuangan. Pengalaman individu dalam mengelola keuangan suatu instansi pemerintah diungkapkan secara terstruktur. Sehingga runtutan peristiwa yang dialami oleh masing-masing individu dapat secara gamblang diuraikan dan diperoleh kesimpulan yang merepresentasikan fenomena yang diteliti.

Dengan fenomenologi peneliti bebas dalam mengespresikan tanpa terkekang dengan prasangka dan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga merepresentasikan pengalaman dari informan sesuai dengan esensi fenomena yang sebenarnya (Gupta & Awasthy, 2015; Moustakas, 1994). Peneliti harus mengesampingkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga esensi yang diperoleh murni dari pengalaman informan. Pendapat, asumsi dan teori yang melekat pada pribadi peneliti harus diletakkan terlebih dahulu dalam menganalisis informasi dari informan. Sehingga hasil penelitian murni dari pengalaman yang dialami oleh masing-masing informan, dan kesimpulan penelitian merepresentasikan esensi fenomena yang sebenarnya (J. W. Creswell &

Creswell, 2022). Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti, dilakukan wawancara kepada informan, observasi lokasi penelitian dan dokumentasi setiap informasi yang diperoleh.

Agar hasil penelitian mampu menangkap fenomena yang diteliti, maka observasi dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Observasi yang lama dapat mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari wawancara ataupun sebaliknya mengkonfirmasi hasil wawancara dengan observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan sebelum dan sesudah wawancara, dengan tujuan observasi awal untuk menangkap fenomena awal pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah yang diteliti. Hasil observasi awal dikonfirmasi saat wawancara dengan informan, dilakukan pendalaman agar informan secara gamblang mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Informasi baru yang diperoleh dari wawancara tersebut dikonfirmasi kembali pada observasi berikutnya.

Setiap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi didokumentasikan sebagai bukti dan petunjuk dari pengalaman masing-masing individu pengelola keuangan. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi satu-kesatuan informasi yang dapat mengungkapkan esensi dari fenomena kecurangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah. Observasi yang lama juga bertujuan untuk memotret seluruh tahapan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Englander & Morley, 2023). Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi satu-kesatuan pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Jalan gelap yang dilalui para informan dapat dimulai sejak tahap perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban. Namun tindakan curang pada suatu tahapan akan dilanjutkan dengan kecurangan pada tahapan berikutnya.

Menggunakan prosedur dari J. Creswell & Poth (2018), fenomenologi transendental pada penelitian ini mengikuti 8 tahapan. Langkah awal dalam penelitian adalah menentukan masalah penelitian. Setelah masalah telah ditentukan dilanjutkan dengan identifikasi fenomena yang menyertai permasalahan tersebut. Tahapan berikutnya mengumpulkan data, yang daapt diperoleh dari wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul menentukan tema berdasarkan informasi penting dari data. Selanjutnya, mengembangkan deskripsi tekstural dan struktural berdasarkan informasi penting yang telah ditentukan. Berdasarkan deskripsi tekstural dan struktural, maka dapat menentukan esensi dari fenomena penelitian. Langkah terakhir menyajikan esensi tersebut secara gamblang, mendiskripsikan secara mendalam hasil penelitian. Alur dan tahapan dari prosedur penelitian ini sebagaimana Gambar 1.

Berdasarkan gambar 1, tahapan terpenting dari fenomenologi transendental adalah mengembangkan deskripsi tekstual dan struktural dari tema penting yang telah disusun sebelumnya. Deskripsi tekstual merupakan sesuatu yang dialami oleh pengelola keuangan yang bersifat nyata dan faktual. Sedangkan, deskripsi struktural merupakan perasaan pengelola keuangan memaknai pengalaman hidupnya dalam mengelola keuangan suatu instansi pemerintah (J. Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Berdasarkan kedua deskripsi tersebut esensi dari fenomena kecurangan pengelolaan keuangan akan muncul kepermukaan. Peristiwa nyata dan pengalaman hidup informan saat mengalami kejadian tersebut merupakan pondasi utama dalam membangun esensi penelitian.



Gambar 1. Prosedur penelitian fenomenologi transendental (J. Creswell & Poth, 2018)

Penelitian ini dilakukan pada suatu instansi pemerintah di Pulau Jawa yang mengelola keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pulau Jawa dipilih sebagai objek penelitian karena Jawa merupakan pusat perekonomian dan pembangunan yang mengakibatkan APBN tersentralisasi di pulau tersebut. Sehingga potensi kecurangan keuangan semakin besar, karena APBN yang dikelola besar. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan observasi awal yang berpotensi terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan pada instansi tersebut. Modus dan faktor penyebab yang mendasari penyimpangan pengelolaan keuangan akan digali kepada para tokoh sentral pengelola keuangan. Tokoh sentral tersebut mengetahui secara detail dan mendalam dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan di instansinya. Pengumpulan informasi diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan, observasi dalam waktu yang lama dan berkesinambungan serta mendokumentasikan seluruh temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi.

Pemilihan informan meliputi pejabat dan staf pengelola keuangan, supplier dan auditor. Pejabat pengelola keuangan sebagai sumber informasi berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan di instansinya. Staf pengelola keuangan sebagai sumber informasi yang mengaplikasikan langsung kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Supplier sebagai mitra instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara sehingga mengetahui seluk-belum penyimpangan pengelolaan keuangan. Auditor sebagai sumber informasi yang memiliki pengalaman melakukan audit pada instansi pemerintah yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Informan yang dipilih merepresentasikan aktor-aktor penting pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir, sehingga esensi penyimpangan pengelolaan keuangan dapat diungkap secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan nama samaran dari informan yang telah dipilih. Bertujuan untuk menjaga identitas diri para informan dan menjunjung etika jurnalistik. Nama-nama pejabat pengelola keuangan pada suatu instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian ini adalah Dava selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Diva menjabat sebagai Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membayar (PPSPM), Divo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Devi yang bertindak sebagai Bendahara. Staf pengelola keuangan yang menjadi informan adalah Dova. Informan sebagaimana telah disebutkan berasal dari internal instansi. Sedangkan informan yang berasal dari luar adalah Davu selaku supplier yang menjadi mitra instansi pemerintah dan Deva selaku auditor yang pernah melakukan audit atas instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian ini.

Wawancara kepada informan dilakukan dalam berbagai kesempatan yang berbeda menggunakan teknik wawancara dengan berbagai sudut pandang sehingga informan merasa nyaman dalam menguraikan pengalamannya. Wawancara dibuat mengalir sehingga informan merasa tidak sedang dimintai keterangan. Dengan harapan informasi yang diberikan adalah informasi yang jujur sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Pertanyaan yang diberikan dikemas dalam berbagai konteks yang beragam namun dengan maksud yang sama, yaitu penyimpangan pengelolaan keuangan. Dimaksudkan untuk menguji konsistensi jawaban dari para informan. Informasi yang diperoleh dari informan yang satu dikonfirmasi kepada informan lainnya untuk memvalidasi dan menggali informasi lebih dalam.

Pertanyaan yang disusun meliputi proses pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Faktor dan modus yang mendasari penyimpangan untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan juga dielaborasi dalam setiap pertanyaan. Guna mendukung dan memvalidasi informasi yang telah diperoleh dari masing-masing informan, observasi dilakukan secara berkesinambungan dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan membandingkannya dengan observasi. Observasi yang lama dan berkesinambungan juga bertujuan untuk memotret kinerja pengelolaan keuangan. Dokumentasi berperan untuk mengabadikan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk gambar, audio maupun video sebagai bukti konkrit penelitian ini. Dokumentasi juga sebagai bahan untuk analisis lebih dalam dari informasi yang telah dikumpulkan.

Keabsahan penelitian ini harus diuji agar kebenaran hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini melakukan triangulasi meliputi pengujian credibility, transferability, dependability dan confirmability. Pengujian credibility dilakukan dengan melakukan konfirmasi informasi kepada masing-masing informan diperkuat dengan observasi yang berkesinambungan dalam waktu yang lama. Pengujian transferability dilakukan berdasarkan objek penelitian yang potensial melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan. Pengujian dependability dapat dilakukan dengan replika penelitian serupa oleh peneliti lainnya. Pengujian confirmability dilakukan dengan menguji hasil penelitian bahwa proses telah dilakukan dengan benar. Penelitian ini juga melakukan uji triangulasi teori, metodologi, data dan peneliti (Denzin & Lincoln, 2018).

Esensi penyimpangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah diperoleh dari analisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data, penyajian data dan kesimpulan. Menggunakan prosedur penelitian dari (J. Creswell & Poth, 2018) sebagaimana Gambar 1. Melakukan reduksi data dengan cara membuat tema berdasarkan informasi penting dari data yang diperoleh. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi data, dilanjutkan dengan mengembangkan deskripsi tekstual dan struktural. Penyampaian data menggunakan deskripsi tekstual dan struktural sebagai acuan dalam menentukan esensi penyimpangan pengelolaan

keuangan suatu instansi pemerintah. Esensi penyimpangan pengelolaan keuangan inilah yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penelitian ini berupa praktik gelap pengelolaan keuangan instansi pemerintah harus dapat diungkap secara gamblang melalui para aktor penting pengelola keuangan. Tentu tidak berlebihan memberikan justifikasi atas tindakan haram para pengelola keuangan tersebut. Fenomena gaya hidup mewah para pengelola keuangan menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara gamblang. Perubahan gaya hidup ini perlu diselidiki lebih mendalam melalui metode pengumpulan data dan informasi yang tepat. Fenomena gaya hidup para pengelola keuangan menjadi perhatian khusus untuk dilakukan eksplorasi lebih mendalam.

Kecurangan pengelolaan keuangan pada suatu instansi pemerintah daerah dapat terpotret dari gaya hidup pejabatnya yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun perubahan gaya hidup tidak serta merta menunjukkan terjadinya kecurangan keuangan, namun fenomena tersebut dapat menjadi petunjuk jalan. Petunjuk inilah yang menjadi awal pendalaman secara komprehensif untuk mengungkap kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Masalah ini sangat sensitif dan harus ekstra hati-hati dalam mengungkapnya. Seperti sebuah pepatah menangkap ikan tanpa membuat keruh airnya.

Hakekatnya tidak ada pembuat salah yang mengakui kesalahannya secara suka rela, pelaku cenderung menyembunyikan rapat-rapat aib yang dilakukannya. Jalan gelap yang dilalui para pengelola keuangan tidak dapat dipisahkan filosofis hidup yang dialaminya. Sehingga segala informasi yang diperoleh dari kehidupan informan, pengamatan dari observasi dan bukti jejak dari dokumentasi menjadi petunjuk dalam mengungkap esensi kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Secara psikologis, tekanan kebutuhan gaya hidup, kesempatan yang terbuka lebar serta membenarkan perbuatan tercela menjadi biasa saja menyempurnakan penyebab kecurangan pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Penelitian ini diawali dengan observasi awal, dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam, hasil observasi dan wawancara dikonfirmasi dengan informan lainnya. Setiap temuan yang diperoleh didokumentasikan sebagai sarana untuk pendalaman informasi. Observasi terus dilakukan secara berkesinambungan. Dokumentasi bertujuan untuk meminimalisir hilangnya informasi apabila karena terbatas ingatan peneliti. Dokumentasi juga sebagai sarana mereviu informasi saat melakukan analisis data. Sehingga momen dan informasi penting secara detail dapat diungkapkan dengan tepat.

Observasi awal telah menemukan permasalahan yang akan diungkap berserta fenomena yang tampak dari permasalahan tersebut. Asumsi filosofi dari fenomena tersebut dikontruksi sehingga menjadi dasar pertanyaan peneliti dalam mengungkap esensi kecurangan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah. Asumsi filosofis sangat penting sebab sebagai pondasi dalam memfokuskan arah penelitian. Berdasarkan informasi dan pernyataan yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dibuat tema penting sehingga mempermudah dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

Setelah tema penting telah ditentukan, maka bagian-bagian penting dari tema tersebut dideskripsikan menjadi deskripsi tekstual dan struktural. Dekripsi tektual dan struktural inilah yang menunjukkan esensi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Deskripsi

tekstual menyajikan pernyataan fakta yang dialami oleh informan maupun peristiwa nyata hasil observasi. Deskripsi struktural menyajikan pengalaman informan maupun peneliti dalam menyikapi deskripsi tekstual. Intisari dari penjabaran deskripsi tekstual dan struktural inilah yang menjadi esensi dari kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Esensi kecurangan pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah meliputi faktor penyebab dan modus operandi yang digunakan pelaku untuk melancarkan perbuatan tercelanya. Berikut esensi faktor yang memotivasi para pengelola keuangan menempuh jalan gelap dan modus yang digunakan untuk menyembunyikan perbuatannya.

Gaya Hidup Mewah

Bidang pengelolaan keuangan diidentikkan dengan lahan basah. Disebut lahan basah karena pegawai yang menjabat diposisi tersebut lebih mudah mendapatkan tambahan penghasilan. Sehingga tidak sedikit pegawai instansi pemerintah selalu mendambakan posisi tersebut. Sebab para pengelolanya selalu mendapatkan penghasilan lebih dibanding pegawai yang tidak diposisi tersebut. Penghasilan dimaksud dapat diartikan sebagai penghasilan yang sah atau sebaliknya. Secara psikologi, pegawai dengan penghasilan yang lebih tinggi akan meningkatkan gaya hidupnya.

Pernyataan Devi selaku bendahara membenarkan asumsi masyarakat tentang lahan basah tersebut, yaitu ungkapan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tambahan. Lahan basah diidentikkan sebagai lahan yang subur sehingga mudah ditanami dan hasil panen yang melimpah. Berikut pernyataan Devi:

“... orang-orang menganggap ditempatkan sebagai pengelola keuangan enak mas, gampang mendapatkan uang, banyak yang mengistilahkan itu lahan basah”

Pernyataan Devi sebagai orang internal instansi terkonfirmasi oleh pernyataan Davu selaku supplier. Davu sebagai orang luar instansi yang banyak berinteraksi dengan orang-orang dari instansi pemerintah lainnya. Pernyataan Davu membenarkan anggapan masyarakat dan Devi. Berikut pernyataan Davu:

“orang-orang dinas yang sering kesini semuanya bilang jika menjadi pengelola keuangan lebih enak mas, cari uang disana gampang, ya... maklumlah bagian keuangan ibarat lahan basah dibanding bagiannya lainnya”

Selaras dengan Devi dan Davu, Divo selaku PPK mendukung pernyataan bahwa anggapan lahan basah lebih mudah mendapatkan uang. Tekanan dari teman dekat dan lingkungan yang dirasakan pengelola keuangan juga meningkat seiring dengan jabatan pengelola keuangan yang diembannya. Gaya hidup pengelola keuangan harus lebih mewah dari sebelumnya. Sebagaimana pernyataan Divo berikut:

“...memang benar begitu anggapan masyarakat mas, menjadi pengelola keuangan harus terlihat kaya, barang-barang yang digunakan harus lebih baik dari teman-teman yang lain. Sebab penghasilan tinggi, gaya hidup harus mengikuti katanya... Mungkin anggapan itulah yang menekan kami mas ...”

Pegawai yang mulanya memiliki gaya hidup biasa akan berubah drastis setelah menjabat pengelola keuangan. Perubahan tersebut disebabkan anggapan masyarakat bahwa penghasilan yang tinggi harus merubah gaya hidup. Anggapan tersebut menjadi tekanan bagi pegawai yang

menjabat pengelola keuangan. Sehingga tekanan tersebut lambat laun akan membentuk karakter pegawai yang curang dalam mengelola keuangan negara. Pegawai yang sebelumnya hidup biasa saja akan terseret arus akibat anggapan menyedihkan yang selama ini berkembang di masyarakat.

Fenomena gaya hidup mewah yang terjadi di lingkungan pengelola keuangan juga menjadi perhatian khusus bagi auditor. Deva selaku auditor senior yang banyak melakukan audit di lingkungan instansi pemerintah menemukan bahwa penampilan para pengelola keuangan lebih baik dibandingkan dengan pegawai lain di kantornya. Berikut pernyataan Deva:

“... selama saya melakukan audit di berbagai instansi pemerintah, tampilan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memang lebih baik mas dibanding pegawai sekantornya, mungkin karena penghasilannya lebih baik mas (tersenyum). meskipun catatan kami saat audit disana juga banyak mas”

Gaya hidup mewah semakin mempertegas bahwa pengelola keuangan tersandera dengan lingkungannya. Tekanan lingkungan untuk bergaya hidup mewah menyebabkan pengelola keuangan melakukan cara yang tercela melakukan kecurangan keuangan. Fenomena gaya hidup mewah para pengelola keuangan merupakan bentuk redflag terjadinya kecurangan keuangan yang dapat diamati.

Kewenangan Seluas-Luasnya

Pengelola keuangan memiliki akses penuh atas keuangan negara yang dikelolanya sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan pengelolaan keuangan saling berkaitan antar tahapan yang satu dengan yang lainnya. Setiap individu dalam tim pengelolaan keuangan memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing. Kewenangan absolut para pengelola keuangan sesuai dengan tugasnya masing-masing menyebabkan kesempatan melakukan kecurangan keuangan terbuka lebar.

Pejabat tertinggi dalam pengelolaan keuangan adalah KPA. KPA yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan. Sebagian kewenangan KPA dilimpahkan kepada PPK yang bertanggungjawab atas pengujian tagihan dan berkomitmen dengan supplier. PPSPM berwenang menguji tagihan keuangan kepada negara. Bendahara bertanggungjawab atas keuangan yang dikelolanya, mengeluarkan keuangan negara atas perintah PPK. Staf keuangan bertugas membantu menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan rentetan tugas dan kewenangan dari masing-masing individu, pengelola keuangan memiliki kewenangan yang saling ketergantungan antara pejabat dengan stafnya. Kewenangan pengelolaan keuangan tersebut menjadi kendali penuh dari KPA, sehingga pegawai dengan jabatan dibawahnya menjadi tunduk atas segala perintahnya. KPA memiliki perintah mutlak atas pengelolaan keuangan sehingga kecurangan keuangan yang diperintahkan oleh KPA menjadi keharusan yang harus dijalankan oleh pegawai dibawahnya.

Dava selaku KPA memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan di instansinya. KPA yang juga sebagai kepala instansi adalah pucuk pimpinan tertinggi dalam instansi pemerintah. Sehingga seluruh pegawai dalam lingkup kekuasaannya. Pegawai yang memiliki jabatan dibawahnya harus tunduk kepada pimpinan pucuk dan tidak punya kekuatan untuk menolak kecurangan keuangan yang terjadi di instansinya. Berikut pernyataan Dava sebagai pimpinan pucuk:

"pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab penuh KPA mas, jadi kebijakan pengelolaannya kami yang menentukan"

Pernyataan Dava sebagai KPA terkonfirmasi dari informasi yang disampaikan Dova. Dova adalah staf pengelola keuangan. KPA sebagai pemegang kendali pengelolaan keuangan, kebijakan yang ditentukan harus diterapkan secara maksimal oleh pegawai dibawahnya. Jika tidak demikian, maka konsekuensi buruk akan diterima oleh para pengelola keuangan yang mengabaikan kebijakan KPA. Namun bentuk penghargaan akan diberikan pimpinan apabila kebijakan kecurangan keuangan dieksekusi dengan baik oleh pegawai dibawahnya. Berikut pernyataan Dova:

"kebijakan keuangan seluruhnya sudah ditentukan KPA mas, kami dibawah hanya melakukan apa yang diinstruksikan... kami dibawah tidak dapat menolaknya, berat konsekuensinya, tapi kami tetap bersyukur pimpinan masih memperhatikan kesejahteraan kami"

Akses pengelolaan keuangan menjadi tanggungjawab para pengelola keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Para pejabat memiliki kewenangan penuh atas kebijakan dan otorisasi sedangkan bendahara dan staf memiliki kewenangan langsung atas bukti pengeluaran. Sehingga kecurangan keuangan harus dilakukan dengan persekongkolan mulai dari jabatan staf hingga pimpinan tertinggi yaitu KPA. Persekongkolan tersebut berimplikasi atas pembagian penghasilan mulai dari jajaran staf hingga KPA.

Pernyataan Diva sebagai PPSPM semakin memperkuat pernyataan dari Dava dan Dova. Pengelolaan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kecurangan keuangan harus dilakukan secara bersama-sama dibawah komando KPA. Sebagaimana pernyataan Diva berikut:

"... kami pengelola keuangan telah diberikan kewenangan masing-masing mas, sehingga kami tidak dapat melakukan serangkaian proses ini sendirian. Kebijakan KPA pasti kami laksanakan, begitu juga semua yang terjadi dibawah kami laporkan kepada KPA melalui PPK, jadi segala sesuatu yang kami lakukan kami saling mengetahuinya (tersenyum). Termasuk uang lelah juga terdistribusi secara adil kepada seluruh teman-teman yang terlibat"

Berdasarkan pernyataan Diva diatas, persekongkolan terjadi untuk saling menutupi kecurangan keuangan yang dilakukan dalam instansi pemerintah. Sebab peraturan perundangan telah membagi tugas dan kewenangannya masing-masing dan tidak dapat dirangkap oleh satu orang untuk jabatan tertentu. Sehingga persekongkolan menjadi alternatif yang tepat untuk melakukan kecurangan keuangan secara berjamaah. Sebagai konsekuensi atas persekongkolan tersebut, kelebihan pendapatan dibagi ke seluruh pengelola keuangan yang terlibat.

Devi selaku bendahara, yaitu tokoh sentral dalam pengelolaan keuangan menyatakan bahwa akses yang luas kepada dokumen sumber serta kebijakan pimpinan untuk melakukan kecurangan keuangan membuka peluang terjadinya kecurangan keuangan. Sebagai konsekuensi atas pemufakatan jahat tersebut, tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh pegawai yang terlibat. Pernyataan Devi sebagai berikut:

"... yang punya akses atas pengelolaan keuangan hanya kami dengan teman-teman saja mas, kami dapat mengkondisikan semuanya. Tergantung kebijakan pimpinan pengelolaannya bagaimana. Yang jelas kesejahteraan pasti kami bagi-bagi mas".

Kewenangan mutlak dari KPA didukung pemufakatan jahat dari seluruh unsur pegawai pengelola keuangan memberikan kesempatan yang cukup bagi para pelaku untuk melakukan kecurangan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah. Sebagai konsekuensi atas persekongkolan tersebut, tambahan penghasilan dari kecurangan keuangan dibagi-bagikan kepada pengelola keuangan yang terlibat.

Tanggungjawab yang Besar

Pengelola keuangan memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi sehingga harus memperoleh reward yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diembannya. Kenyataannya, beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi tidak diiringi dengan tambahan penghasilan yang memadai. Honorarium para pengelola keuangan yang sangat minim dirasa tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dipangkunya. Sehingga para pengelola keuangan mencari penghasilan dengan jalur yang tidak dibenarkan. Tindakan kecurangan keuangan menjadi solusi instan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Para pengelola keuangan beranggapan bahwa kecurangan pengelolaan keuangan umum terjadi pada instansi pemerintah lainnya. Meskipun awalnya para pengelola keuangan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tercela, namun lambat laun perasaan tersebut mulai pudar dan membenarkan tindakan tercela yang dilakukannya saat ini. Kejadian ini sesuai dengan pernyataan Davu selaku supplier yang banyak bermitra dengan instansi pemerintah, bahwa pada instansi pemerintah lainnya kecurangan pengelolaan keuangan wajar terjadi. Berikut pernyataan Davu:

“...orang-orang yang kesini beranggapan kecurangan sudah lumrah terjadi mas, macam-macam alasannya ... mungkin hati nuraninya sudah mati mas (tersenyum tipis)”

Dova selaku staf memiliki pengalaman yang sama dengan tema-temanya di instansi lainnya, bahwa kecurangan keuangan yang dilakukannya juga terjadi pada instansi pemerintahan lainnya. Sehingga pembenaran itulah yang menyebabkan kecurangan keuangan semakin tumbuh subur dalam instansi pemerintah. Berikut pernyataan Dova tentang pembenaran tersebut:

“teman-teman saya di instansi lainnya juga tidak berbeda dengan kita mas, mungkin yang berbeda antara kami dengan mereka tentang cara-caranya saja.

Dava selaku KPA juga menyatakan pernyataan serupa, bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang tinggi tidak sepadan dengan honor yang diterimanya, sehingga menerapkan kebijakan untuk mengkondisikan tambahan penghasilan tidak sah kepada para pengelola keuangan. Pernyataan Dava yaitu:

“beban tugas dan tanggung jawab kami tinggi mas, sebenarnya kami juga mempunyai tugas pokok yang lain, tapi tenaga kami terkuras habis pada pengelolaan keuangan ini. Meskipun honor nya ada, tapi masih jauh lebih besar tugas dan tanggung jawabnya mas... kebijakan saya dan teman-teman kondisikan saja (ekspresi optimis)...”

Selanjutnya, Deva selaku auditor juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan sangat besar. Terlebih honor yang diterima para pengelola keuangan saat ini telah dipangkas sesuai dengan ketentuan peraturan. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan keuangan tumbuh subur. Pelaku merasa tugas dan tanggung jawab

yang diimbannya sangat besar, namun honor yang diterimanya semakin menurun. Berikut pernyataan Deva:

"... terkadang kasihan juga dengan beban tugas dari temen-temen pengelola keuangan mas, mereka pasti tidak ada liburnya. Honor temen-temen pengelola keuangan juga dipangkas saat ini mas, tapi beban pekerjaan semakin meningkat."

Bendahara memiliki tanggung jawab dan tugas terbesar diantara pengelola keuangan yang lainnya. Seluruh pengeluaran uang negara harus melalui bendahara. Ditambah tugas administrasi yang dibebankan kepadanya yang menyebabkan bendahara semakin sibuk dengan rutinitasnya. Honor yang diterima mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga rasionalisasi melakukan kecurangan keuangan lambat laun tumbuh dalam diri bendahara. Berikut pernyataan Devi selaku bendahara:

"kerjaan ini seakan tidak pernah selesai mas (tersenyum), kerjaan silih berganti, ditambah tanggung jawab kami ini sangat besar mas... tapi apresiasi negara atas kerjaan kami ini semakin dikurangi mas, semakin lucu saja ya... keluhan temen-temen yang lain juga demikian, akhirnya kami kondisikan saja mas..."

Tugas dan tanggung jawab yang besar tanpa diimbangi dengan penghargaan yang setimpal menyebabkan pengelola keuangan membenarkan kecurangan keuangan yang dilakukannya. Mengambil uang negara dengan cara yang tidak sah dianggap biasa sebagai kompensasi yang setimpal atas dedikasi pekerjaannya selama ini.

Penyembunyian Kecurangan Keuangan

Berbagai modus digunakan oleh pelaku kecurangan keuangan untuk menyembunyikan perbuatannya. Memanipulasi bukti pengeluaran untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Sedangkan manipulasi bukti pengeluaran melakukan markup harga satuan atau kuantitas barang atau jasa yang dibeli sehingga harga yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari harga sebenarnya.

Manipulasi bukti pengeluaran tersebut sesuai dengan pernyataan Devi selaku bendahara sebagai berikut:

"biasanya kami lakukan markup bukti pengeluaran mas, uangnya kami bagi dengan teman-teman yang lain. Kasihan mas beban kerja tinggi tapi honor sedikit, jadi buat tambahan (tersenyum) ..."

Davu selaku supplier mendukung pernyataan Devi. Davu membantu untuk memanipulasi bukti pengeluaran. Berikut pernyataan Davu:

"... markup bukti pengeluaran sudah biasa mas, biasanya teman-teman yang belana disini minta dinaikkan kuantitas atau harga satuannya mas"

Manipulasi bukti pengeluaran menjadi solusi terbaik yang dipilih pengelola keuangan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Secara etika manipulasi bukti pengeluaran tidak begitu parah jika dibandingkan dengan membuat bukti pengeluaran fiktif. Perbedaan dari keduanya adalah manipulasi bukti pengeluaran meningkatkan kuantitas atau harga satuan sehingga harga totalnya juga meningkat tetapi pembelian memang dilakukan. Sedangkan bukti pengeluaran fiktif pembelian tidak pernah dilakukan.

Esensi Kecurangan Keuangan

Esensi kecurangan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah berdasarkan pengalaman pengelola keuangan disebabkan karena tekanan, kesempatan dan pembenaran sesuai dengan teori fraud triangle (Cressey, 1953). Tekanan gaya hidup mewah membutuhkan keuangan yang besar menjadi penyebab pelaku melakukan kecurangan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Haurissa & Dewi (2021) bahwa gaya hidup yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai menyebabkan kecurangan keuangan. Kesempatan muncul ketika pelaku memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap sumber daya dan lemahnya pengawasan internal sehingga kecurangan keuangan terjadi (Awaliah, 2023; Kohar et al., 2024). Pelaku yang mengalami tekanan sehingga termotivasi melakukan kecurangan keuangan, namun kesempatan tertutup rapat, tidak akan terjadi tindakan kecurangan keuangan (Maulidi, 2020). Pelaku kecurangan keuangan mencari pembenaran moral sehingga menganggap yang dilakukan adalah benar dan wajar karena tanggung jawab yang besar sehingga berhak mendapatkan kompensasi lebih besar atau bahwa insentif formal yang diberikan tidak sebanding dengan tingkat tanggung jawab (Haurissa & Dewi, 2021).

Perbuatan kecurangan keuangan mendorong modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menyembunyikan kecurangan keuangan dengan cara memanipulasi bukti pengeluaran, yaitu melakukan markup pengeluaran atau membuat pengeluaran fiktif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tarjo & Riskiyadi (2022) yang menyatakan pelaku kecurangan keuangan pada instansi pemerintah menyembunyikan perbuatannya dengan melakukan markup bukti belanja dan manipulasi bukti pengeluaran. Kelebihan dari markup bukti pengeluaran tersebut dinikmati bersama oleh pengelola keuangan. Kelebihan dari manipulasi bukti keuangan tersebut sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan suatu instansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kecurangan keuangan yang dilakukan pengelola keuangan pada suatu instansi pemerintah memberikan ceritanya masing-masing. Fraud triangle menjadi faktor yang memotivasi para pengelola keuangan melakukan tindakan tercela tersebut. Tekanan dari lingkungan sekitar untuk memenuhi gaya hidup mewah membuat pengelola keuangan melakukan kecurangan keuangan. Kesempatan yang terbuka lebar atas kewenangan yang seluas-luasnya bagi para pengelola keuangan menjadi angin segar untuk melakukan kecurangan keuangan. Pembenaran melakukan kecurangan keuangan karena tugas dan tanggung jawab yang besar namun tidak memperoleh apresiasi yang setimpal membuat pengelola keuangan menambah penghasilannya dengan cara yang tidak sah.

Untuk menyembunyikan kecurangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah, para pengelola keuangan memanipulasi bukti pengeluaran. Pembelian memang dilakukan tetapi dilakukan markup untuk jumlah kuantitas atau nilai harga satuannya. Selisih antara pembelian yang sebenarnya dengan bukti pengeluaran setelah markup dibagi-bagikan kepada para pengelola keuangan. Terjadi persekongkolan antar pengelola keuangan sehingga

antar individu akan saling menutupi perbuatannya masing-masing. Fenomena gaya hidup mewah para pengelola keuangannya menjadi petanda kecurangan keuangan pada instansi pemerintah.

Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pemilihan fenomena yang tampak ke permukaan. Dalam banyak kasus kecurangan keuangan, fenomenanya terkadang tersembunyi. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi dari fenomena yang tersembunyi. Temuan penelitian ini menjadi peringatan dan masukan kepada para pemangku kepentingan, pimpinan tinggi kementerian atau lembaga dan auditor pemerintah untuk fokus melakukan mitigasi kecurangan pengelolaan keuangan yang terjadi pada instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtnn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf> accessed on 01 July 2024
- Alfada, A. (2019). The Destructive Effect of Corruption on Economic Growth in Indonesia: A Threshold Model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press California.
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *SAGE Publications* (Fifth, Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications. Thousand Oaks, California. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Sembiring, L. D., Putri, J. A., Sianipar, R. T., & Silitonga, H. P. (2023). Influence of organizational culture and organizational commitment to the effectiveness of control systems internal government and it's impact on the quality of financial statements. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1440–1452. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1475>
- Englander, M., & Morley, J. (2023). Phenomenological Psychology and Qualitative Research. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 22(1), 25–53. <https://doi.org/10.1007/s11097-021-09781-8>
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and Economic Growth: New Empirical Evidence. *European Journal of Political Economy*, 60, 101810. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001>
- Gupta, R. K., & Awasthy, R. (2015). *Qualitative Research in Management: Methods and Experiences*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Haurissa, N. F., & Dewi, C. N. (2021). Fraud di Pemerintahan Analisis Meta: Studi di Indonesia. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 297–319. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p297-319>

- ICW. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*.
- Indriani, N., Alim, M. N., & Haryadi, B. (2019). The Fraud Portrait in Budget Planning by the Regional Government Apparatus. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(1), 115–122. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1374>
- Kohar, Y. P., Darmawati, & HS, R. (2024). Overview of Fraud Dynamics in Government: Trends, Causes, and Mitigation Strategies. *Jurnal Economic Resource*, 7(2), 192–208. <https://doi.org/10.57178/jer.v7i2.1012>
- Lambie, G. W., & Haugen, J. S. (2019). Understanding Greed as a Unified Construct. *Personality and Individual Difference*, 141, 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.12.011>
- Maulidi, A. (2020). Storytelling of Bureaucratic White-collar Crimes in Indonesia: Is it a Matter of Reciprocal Norm? *Journal of Financial Crime*, 27(2), 573–586. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2019-0087>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1506. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023>
- Prabowo, H. Y., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2018). Forgetting Corruption: Unlearning the Knowledge of Corruption in the Indonesian Public Sector. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 28–56. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2016-0048>
- Riskiyadi, M. (2025). Phenomenological Study in Revealing Village Fund Fraud. *APPSAI Accounting Review*, 5(1), 64–74. <https://doi.org/10.26418/apssai.v5i1.122>
- Riskiyadi, Moh. (2021). Revealing the Socio-Cultural Perspective of Madurese Community on Tax Avoidance in Government Agencies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 618–628. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.15841>
- Riskiyadi, Moh., Tarjo, & Anggono, A. (2020). Dilemma between Fraud and Tax Compliance at Government Agencies. *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)*, 1(1), 13–20.
- Riskiyadi, Moh., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Uncovering Tax Avoidance at Government Agencies: A Phenomenological Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 22. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p02>
- Roffia, P., & Poffo, M. (2025). Revisiting the Fraud Triangle in Corporate Frauds: Towards a Polygon of Elements. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(3), 156. <https://doi.org/10.3390/jrfm18030156>
- Rustiarini, N. W., Sutrisno, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Fraud Triangle in Public Procurement: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 951–968. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0121>
- Setiawan, A. R. (2019). "Malo" dan Penegakan Karakter Kejujuran: Tafsir Budaya(wan) Madura atas "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 251–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i02.p10>
- Siregar, P., Kesuma, S. A., Muda, I., & Syarif, F. (2026). A Systematic Literature Review of the Fraud Triangle Theory (2020–2025). *Jurnal EMT KITA*, 10(1), 504–511. <https://doi.org/10.35870/emt.v10i1.5818>

- Sitorus, L., H. N. U., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Suasri, E., Rininda, B. P., Amelia, N., Lestari, A., Amelia, D., & Utami, V. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 21–35. <https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.7805>
- Suka, T. E. K. B. G. (2025). Akuntansi Forensik Sebagai Instrumen Antikorupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Literatur. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 212–219. <https://doi.org/10.54951/sintama.v5i2.1036>
- Tarjo, T., & Riskiyadi, Moh. (2022). Revealing the Fraud at the End of the Fiscal Year at Local Government Agencies in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 9(4), 451–464. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.123723>
- Tarjo, T., Riskiyadi, Moh., & Sanusi, Z. M. (2021). Socio-Cultural Perspectives in Tax Avoidance at Government Agencies. *International Business and Accounting Research Journal*, 5(2), 134–142. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.200>
- Wana, D., Rohman, A., & Raharja, S. (2025). Fraud Detection in Government in the Last Ten Years. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10(1), 154–160. <https://doi.org/10.30871/jaat.v10i1.9212>
- Rohim, M. A. A., Sudaryanti, D., & Hariri, H. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *E-Jra*, 11(2), 37–48.
- Waromi, J., Rofingatun, S., & Nababan, D. M. (2025). Systematic Analysis of the Application of Fraud Triangle Theory in Accounting Fraud Detection: A Literature Review of Pressure, Opportunity, and Rationalisation. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3), 4386–4397. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15905>
- Wicaksono, B., Rachman, A., & Setyaningsih, P. A. (2023). Pengaruh Fraud Pentagon, Stabilitas Keuangan, dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Monex Journal Research Accounting*, 12(2), 297–308. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5472>